

# **PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PULAU KALIMANTAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syara Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



OLEH

**HERI GUNAWAN**

5553200007

**JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2024**

**PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN  
DANA DESA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI KABUPATEN PULAU KALIMANTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syara Dalam Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

OLEH

**HERI GUNAWAN**

**5553200007**

**JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Heri Gunawan, 5553200007, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul:

“ Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pulau Kalimantan”

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) dari universitas sultan ageng tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Dalam skripsi saya, bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari tulisan orang lain telah dibenarkan secara eksplisit dengan mengikuti standar, prinsip, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini, secara keseluruhan atau sebagian, bukan karya saya sendiri atau ada plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima konsekuensi seperti pencabutan gelar akademik saya dan sanksi tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Serang, 17 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



**Heri Gunawan**

**5553200007**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN  
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

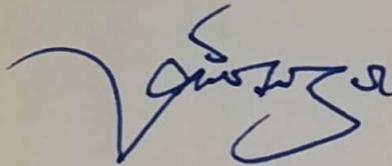
Skripsi dengan judul:

**PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN PULAU KALIMANTAN**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan **LULUS**  
Pada hari Rabu, 3 Juli 2024 oleh Dewan Penguji.

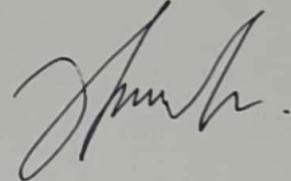
Serang, 3 Juli 2024

Pembimbing I



**Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T.**  
NIP. 198801052024211019

Pembimbing II



**Deris Desmawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 198612132019031008

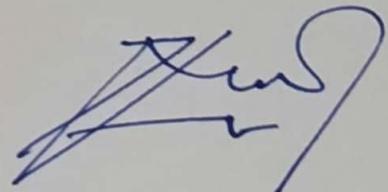
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Fabagus Ismail, SE, MM, Ak.**  
**CA, CMA**  
NIP. 197312302001121001

Ketua Jurusan  
Ilmu Ekonomi Pembangunan

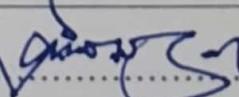


**Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si**  
NIP. 19701105200812100

Dewan Penguji

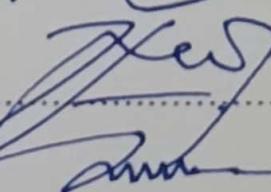
**Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T.**  
NIP. 198801052024211019

Tanggal 6/11-24

Tanda Tangan 

**Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si**  
NIP. 19701105200812100

Tanggal 6/11-24

Tanda Tangan 

**Saharuddin Didu, STP., ME.**  
NIP. 197807042010121001

Tanggal 24/10-24

Tanda Tangan 

Nama : Heri Gunawan  
NIM : 5553200007  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan  
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto**

*“Maju Tanpa Batas, Belajar Tanpa Henti”*

### Persembahan:

“Skripsi ini saya persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua saya, serta kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus kepada saya”

1. Kedua orang tua saya, Bapak Karwan dan Ibu Juminah, Terima kasih atas doa, dukungan, serta kehadiran yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup ini, yang telah membantu penulis menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
2. Kakak dan adik saya tersayang Sahid Septiawan, Rully Intan, dan Saharani sinta Pratiwi Terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Dana bagi hasil, Dana insentif daerah, dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia dipulau kalimantan tahun 2018- 2022. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data time series periode 2018-2022 dan data cross section pada 17 kabupaten di pulau Kalimantan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan metode FEM(Fixed Effect Model). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan, variable Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan, variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan, variabel Dana insentif daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan variabel Dana desa berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dikabupaten pulau Kalimantan tahun 2018-2022. Juga, secara simultan menunjukkan bahwa variabel Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Dana bagi hasil, Dana insentif daerah, dan Dana desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dikabupaten pulau Kalimantan tahun 2018-2022.

**Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, IPM**

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of the general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing fund, regional incentive fund, and village fund on the human development index on the island of Kalimantan in 2018-2022. This study uses panel data consisting of time series data for the period 2018-2022 and cross section data on 17 districts on the island of Kalimantan. The analytical tool used is panel data regression with the FEM (Fixed Effect Model) method. Based on the results of this study, it shows that partially the general allocation fund variable has a significant positive effect, the special allocation fund variable has a positive and significant effect, the revenue sharing fund variable has a significant positive effect, the regional incentive fund variable has a negative and insignificant effect, and the village fund variable has a positive and insignificant effect on the Human Development Index in the Kalimantan island districts in 2018-2022. Also, it simultaneously shows that the variables of the general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing fund, regional incentive fund, and village fund have a significant effect on the Human Development Index in Kalimantan island districts in 2018-2022.*

**Keywords:** *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Incentive Fund, Village Fund, HDI.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan" ini dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya, bahkan kritik yang membangun serta mendorong semangat sehingga penulis mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berwenang guna memperbaiki kekurangan yang ada didalam penelitian ini guna perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap bahwa outline untuk penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan segala kesalahan dan kekurangan akan dijadikan bahan untuk penelitian dan koreksi lebih lanjut sehingga lebih bermanfaat lagi. Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M. Ak, CA, CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Bapak Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik yang membangun dalam skripsi ini agar menjadi skripsi yang lebih baik.
4. Kedua orang tua saya, Bapak Karwan dan Ibu Juminah, Terima kasih atas doa, dukungan, serta kehadiran yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup ini, yang telah membantu penulis menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik
5. Kakak dan adik saya tersayang Sahid Septiawan, Rully Intan, dan Saharani sinta Pratiwi Terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Deris Desmawan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan nasihat, motivasi dan ilmunya saat menuntut ilmu di Jurusan Ekonomi Pembangunan UNTIRTA dan selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu bagi penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

7. Bapak Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, motivasi, dukungan dan nasihat. Penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari beliau, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Saharuddin Didu, STP., ME., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, saran, dan kritik yang membangun dalam skripsi ini agar menjadi skripsi yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan UNTIRTA yang telah mengajarkan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
10. Muhammad El Kahlil Gibran, Rahul Reyhan Pratama, Rigan Whana Yuda dan Gian Carlo Emanuel selaku teman dekat penulis yang selalu menemani penulis terutama ketika menyusun skripsi.
11. Alexandro Yohan Enrico dan TB. Farhan Hidayat selaku teman-teman seperjuangan yang sudah telah banyak membantu dan mendukung penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Kepada banyak pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu, terimakasih atas dukungan serta do'a nya

Serang, Oktober 2024

Heri Gunawan

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	15
1.1. Latar Belakang Masalah.....	15
1.2. Rumusan Masalah .....	25
1.3. Tujuan Penelitian .....	25
1.4. Manfaat Penelitian .....	25
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	26
1.4.2 Manfaat Praktis .....	26
BAB II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kajian Empiris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Kerangka Pemikiran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.1 Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Model Penelitian dan Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.1 Pendekatan Model .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.2 Pemilihan Model .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.3 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.4.4 Hipotesis Statistik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Gambaran Umum Objek/Daerah Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2 Perkembangan Dana Alokasi Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.5 Perkembangan Dana Insentif Daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.6 Perkembangan Dana Desa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Analisis Deskriptif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1 Pendekatan Model .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2 Pemilihan Model .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Hasil Uji Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.1 Uji Statistik t ( Uji Parsial) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.2 Uji Statistik F ( Uji Simultan).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.3 Koefisien Determinasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4 Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.4 Pengaruh Dana Insentif Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.5 Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan IPM Pulau Kalimantan dengan DKI Jakarta .....	19
Gambar 1. 2 IPM Kabupaten .....	21
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 1 IPM Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 2 DAU Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022 ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 3 DAK Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022 ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 4 DBH Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 5 DID Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4. 6 DD Kab. Pulau Kalimantan 2018-2022 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 IPM 5 Pulau Terbesar di Indonesia .....	16
Tabel 2. 1 Kajian Empiris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 1 Operasional variabel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 2 Pendekatan Model .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 3 Uji Chow .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 4 Uji Hausman .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 5 Uji Multikolinearitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 8 Uji Statistik t .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 9 Uji Statistik F .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. 10 Koefisien Determinasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu aset penting untuk pembangunan suatu negara adalah sumber daya manusia. Pembangunan manusia juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan negara selain pertumbuhan ekonominya (Widodo & Johanna Maria, 2012). Pembangunan manusia adalah proses untuk meningkatkan potensi pilihan bagi penduduk, atau secara umum didefinisikan sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat di sebuah negara sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menentukan masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual (Firly Dwitya Kamilia, 2016) .

Sejak tahun 1999,UNDP memperkenalkan suatu ide tentang cara mengukur kualitas pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia, atau IPM, adalah konsep yang kemudian dikenal sebagai indeks pembangunan manusia. IPM terdiri dari indikator kualitas hidup yang baik yang terdiri dari tiga (tiga) komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi (Nurmainah, 2013). Lebih lanjut, Umiyati, 2017 menyatakan bahwa kualitas hidup manusia diharapkan dapat ditingkatkan melalui perbaikan ketiga komponen utama tersebut. Kualitas hidup yang layak, yang dipengaruhi oleh keberagaman atau perbedaan karakteristik masyarakat dan individu, kondisi geografis yang berbeda, dan status sosial kemasyarakatan yang berbeda, bukan lagi merupakan indikator utama keberhasilan kinerja pembangunan suatu negara atau daerah. Selanjutnya, UNDP menyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) adalah proses yang terdiri dari empat komponen

utama: keadilan, daya produksi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Bukan lagi hanya mencapai tujuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator dalam mengukur kemajuan suatu negara atau wilayah. Ada korelasi kuat antara skor IPM dan kondisi sumber daya manusia suatu wilayah. Skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sumber daya manusia di wilayah tersebut berkualitas tinggi, sedangkan skor yang lebih rendah menunjukkan bahwa sumber daya manusia di wilayah tersebut berkualitas rendah. Namun, sumber daya manusia (SDM) adalah komponen utama yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara.

Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari berbagai pulau kecil dan pulau besar. Semuanya tersebar dari wilayah sabang hingga merauke dengan karakteristik bervariasi pula. Di Indonesia sendiri, ada 5 pulau besar yang dikenal dan banyak ditinggali oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

*Table 1.1 IPM 5 Pulau Terbesar di Indonesia*

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi				Pulau
	2018	Rank	2022	Rank	
Aceh	71,19	10	72,8	11	Sumatera
Sumatera Utara	71,18	11	72,71	14	
Sumatera Barat	71,73	8	73,26	8	
Riau	72,44	5	73,52	6	
Jambi	70,65	16	72,14	18	

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi				
	2018	Rank	2022	Rank	Pulau
Sumatera Selatan	69,39	22	70,9	22	
Bengkulu	70,64	17	72,16	17	
Lampung	69,02	23	70,45	23	
Kep. Bangka Belitung	70,67	15	72,24	15	
Kep. Riau	74,84	4	76,46	4	
Dki Jakarta	80,47	1	81,65	1	
Jawa Barat	71,3	9	73,12	9	
Jawa Tengah	71,12	12	72,79	12	
Di Yogyakarta	79,53	2	80,64	2	
Jawa Timur	70,77	14	72,75	13	
Banten	71,95	7	73,32	7	
Kalimantan Barat	66,98	26	68,63	26	Kalimantan
Kalimantan Tengah	70,42	20	71,63	21	
Kalimantan Selatan	70,17	21	71,84	19	
Kalimantan Timur	75,83	3	77,44	3	

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi					
	2018	Rank	2022	Rank	Pulau	
Kalimantan Utara	70,56	19	71,83	20	Sulawesi	
Sulawesi Utara	72,2	6	73,81	5		
Sulawesi Tengah	68,88	24	70,28	24		
Sulawesi Selatan	70,9	13	72,82	10		
Sulawesi Tenggara	70,61	18	72,23	16		
Gorontalo	67,71	25	69,81	25		
Sulawesi Barat	65,1	27	66,92	27		
Papua Barat	63,74	28	65,89	28		Papua
Papua	60,06	29	61,39	29		

(Sumber: BPS)

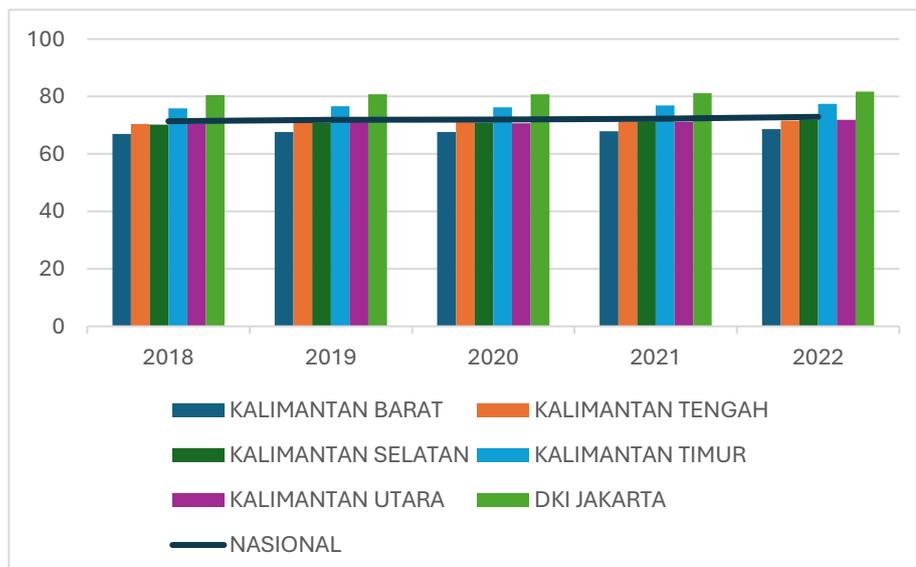
Berdasarkan tabel 1.1 IPM 5 pulau terbesar di Indonesia menunjukkan dinamika yang unik dan signifikan dalam perkembangan IPM di antara provinsi-provinsi di pulau ini.

Data menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki salah satu IPM tertinggi di Indonesia, meningkat dari 75,83 pada tahun 2018 menjadi 77,44 pada tahun 2022, dan menempati peringkat ketiga secara nasional. Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki faktor-faktor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, seperti infrastruktur yang lebih baik, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai.

Sebaliknya, Kalimantan Barat memiliki IPM perbandingan lebih rendah dengan provinsi lain di pulau yang sama, yaitu 66,98 pada tahun 2018 dan 68,63 pada tahun 2022, menempati peringkat ke-26. Perbedaan signifikan ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembangunan antarprovinsi di Kalimantan. Kondisi ini memberikan peluang untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan disparitas tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kebijakan pemerintah. Meneliti lebih dalam tentang apa yang berhasil di Kalimantan Timur dan tantangan apa yang dihadapi oleh Kalimantan Barat dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan.

Skor IPM di setiap provinsi Pulau Kalimantan umumnya menunjukkan tren meningkat secara linier. Sementara Kalimantan Timur memiliki IPM yang secara umum tinggi dibanding dengan IPM nasional, sementara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat memiliki nilai IPM masih rendah ketimbang IPM nasional. Akibatnya, IPM Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena skornya kurang dari rata-rata nasional.

(Sumber : BPS)



Gambar 1. 1 Perbandingan IPM Pulau Kalimantan dengan DKI Jakarta

Gambar 1.1 menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk beberapa provinsi di Pulau Kalimantan dan DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2022. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat IPM di DKI Jakarta secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi di Pulau Kalimantan. DKI Jakarta memiliki IPM yang relatif stabil dan cenderung meningkat setiap tahun, dengan nilai tertinggi mencapai skor 81,65 pada tahun 2022.

Sementara itu, provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan juga menunjukkan tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta. Provinsi Kalimantan Timur memiliki IPM tertinggi di antara provinsi-provinsi Kalimantan, dengan nilai mencapai skor 77,44 pada tahun 2022, sementara Kalimantan Barat memiliki IPM terendah, dengan skor 68,63 pada tahun yang sama.

DKI Jakarta memiliki IPM yang lebih tinggi, menunjukkan akses lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat urbanisasi, tingkat pembangunan infrastruktur, akses terhadap sumber daya, dan kebijakan pembangunan yang diterapkan di masing-masing wilayah.

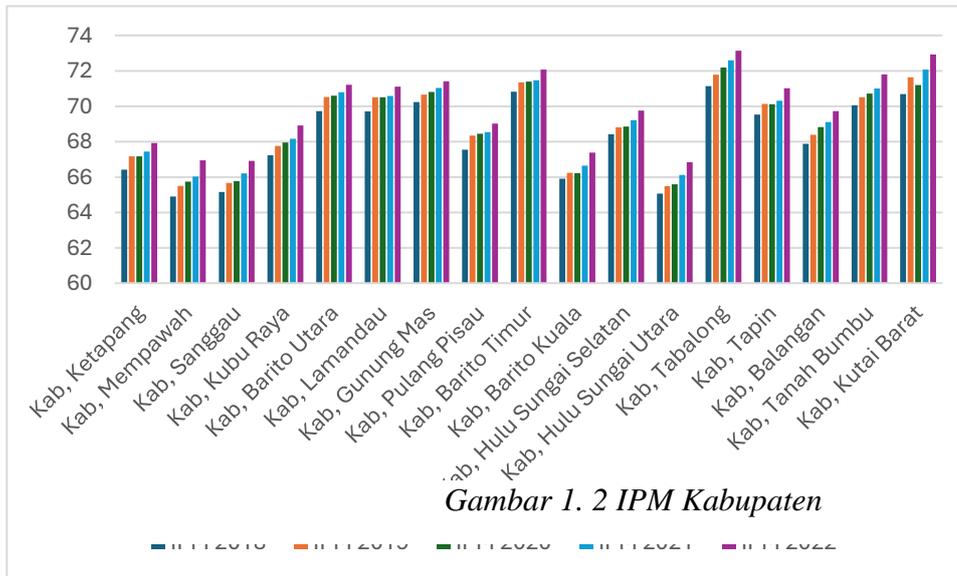
Berdasarkan analisis terhadap perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Pulau Kalimantan dan DKI Jakarta, DKI Jakarta dapat disimpulkan memiliki tingkat IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih tinggi.

Perbedaan ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam mempersiapkan Pulau Kalimantan sebagai ibukota negara baru jika dibandingkan dengan DKI Jakarta sebagai ibukota sebelumnya. Pulau Kalimantan perlu melakukan sejumlah upaya untuk

meningkatkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia agar dapat setara dengan standar yang telah dicapai oleh DKI Jakarta.

*Sumber: BPS*

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan adanya variasi pertumbuhan antar daerah.



Gambar 1. 2 IPM Kabupaten

Kabupaten Tabalong menonjol dengan pertumbuhan IPM tertinggi dari 71,14 pada tahun 2018 menjadi 73,13 pada tahun 2022. Sebaliknya, Kabupaten Mempawah menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, dari 64,90 pada tahun 2018 menjadi 66,94 pada tahun 2022. Kabupaten seperti Barito Timur, Gunung Mas, dan Kutai Barat juga menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam IPM, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, meskipun masih ada peningkatan setiap tahunnya.

Perbedaan pertumbuhan ini menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia di berbagai daerah. Variasi dalam pertumbuhan IPM di berbagai kabupaten dapat disebabkan oleh perbedaan dalam kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi, infrastruktur, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Pada masa reformasi, pemerintah daerah diberi otonomi oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Daerah otonom memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi masalah lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan keinginan masyarakat (Bastian, 2006). Otonomi daerah berarti bahwa pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah keuangan mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Kontribusi terhadap pemerintah terdiri dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat meningkatkan IPM suatu daerah karena setiap pendapatan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dana transfer kedaerah dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dana transfer kedaerah meliputi Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), Dana bagi hasil (DBH), Dana insentif daerah (DID) dan Dana desa (DD).

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk studi yang dilakukan oleh Putra & Ulupui, (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap IPM secara signifikan karena DAU difokuskan untuk pembangunan manusia oleh pemerintah daerah. Dana Khusus (DAK) dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ulupui, (2015), dan Riviando et al., (2019) menyatakan bahwa DAK memiliki efek positif signifikan terhadap IPM karena DAK dirancang untuk membangun infrastruktur dan membangun desa yang tertinggal. Dana Bagi Pendapatan (DBH) dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Santi & , Heppy Purbasari, SE, (2019) dan Lestari, Sarfiah & Prasetyanto (2019) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap IPM. Dana Desa menurut Manggala, (2019) yang menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat, artinya bahwa variabel Dana Desa dapat mendorong terjadinya peningkatan IPM di Kabupaten / Kota di Jawa Barat.

Meningkatnya DAU, DAK, DBH, DID, dan DD terhadap IPM tidak selalu diikuti dengan keberhasilan pendapatan daerah. Beberapa penelitian juga menemukan

bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Williantara & Budiasih (2016) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa DAU tidak berdampak pada IPM karena DAU adalah komponen alokasi dasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai daripada untuk belanja modal. Nova Yurista Santi (2019) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) menyatakan bahwa DAK tidak mempengaruhi IPM karena tidak memisahkan alokasi DAK perbidang, sehingga tidak dapat mengetahui secara rinci apa yang dibangun pemerintah. Williantara & Budiasih (2016) dan Rahmayati & Pertiwi (2018) menemukan bahwa DBH tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap variabel IPM. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan DBH, tetapi beberapa bagian tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Menurut Azwar & Subekan, (2014) Studi ini menyelidiki hubungan antara kesejahteraan sosial di beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan antara tahun 2008 dan 2012. Tingkat otonomi, efektivitas, dan efisiensi operasi keuangan lokal merupakan indikator independen dari kinerja keuangan lokal. IPM menunjukkan kesejahteraan sosial sebagai variabel tergantung. Kinerja keuangan daerah yang efisien secara parsial berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial, tetapi tidak signifikan. Penelitian m. Afrizal Yusuf, (2019) bahwa Dana Desa berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia di setiap kabupaten di Jawa Barat; namun, pengaruh Dana Desa tidak signifikan, jadi kenaikan Dana Desa tidak dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam hasil penelitian tentang hubungan variabel DAU, DAK, DBH, DID, dan DD dengan variabel IPM. Peningkatan DAU, DAK, DBH, DID, dan DD tidak selalu disusul dengan peningkatan IPM di suatu daerah. Hal ini menarik untuk diteliti karena seharusnya

mempengaruhi dan meningkatkan IPM di daerah tersebut jika dialokasikan sesuai dengan kegunaan pendapatan masing-masing daerah.

Dari penelitian selama 5 tahun terakhir sangat jarang sekali yang meneliti IPM di wilayah pulau kalimantan. Seperti penelitian (Harsono, 2024) meneliti IPM di wilayah NTB, (Ulfatussaniah et al., 2024) meneliti IPM di wilayah pulau Sumatra, (Syafira et al., 2024) meneliti IPM di provinsi Papua, (Abdillah & Wahyudi, 2021) meneliti di wilayah papua barat, (Wulandari et al., 2022) meneliti di wilayah jawa timur, (Ramadhan, 2024) meneliti IPM di wilayah Jawa Barat, (Ainuri & Febrina, 2022) meneliti IPM di wilayah Papua, (Fadilah, 2023) meneliti di wilayah Indonesia timur. Selama 5 tahun terakhir yang meneliti IPM di wilayah Kalimantan hanya 3 saja (Ramadhani, 2022) yang meneliti IPM di wilayah Kalimantan Selatan, (Siburian et al., 2021) meneliti IPM di provinsi Kalimantan Tengah dan (Susanti & Hidayat, 2020) yang meneliti IPM di wilayah Kalimantan Timur.

Dari permasalahan tersebut, pembangunan di pulau kalimantan belum merata. Melihat besarnya perbedaan antar provinsi dengan nilai IPM tertinggi dengan terendah menunjukkan bahwa masih terdapat besarnya jurang perbedaan kesejahteraan masyarakat dari provinsi – provinsi di pulau Kalimantan sehingga tidak tercapainya target nasional dalam sektor IPM. Sehingga penting untuk menentukan komponen mana yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pulau Kalimantan. Maka, penelitian ini akan menyelidiki komponen-komponen yang memengaruhi indeks pembangunan manusia. Penelitian juga akan menyelidiki bagaimana dana transfer ke daerah, dan dana desa mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Akibatnya, penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: **“Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pulau Kalimantan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh dana transfer ke daerah dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten pulau kalimantan secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh dana transfer ke daerah dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten pulau Kalimantan secara simultan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berikutini merupakan target penelitian:

1. Mengidentifikasi pengaruh positi dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial.
2. Mengidentifikasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial.
3. Mengidentifikasi pengaruh dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial.
4. Mengidentifikasi pengaruh dana insentif daerah terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial.
5. Mengidentifikasi pengaruh dana desa terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial.
6. Mengidentifikasi pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah dan dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten pulau kalimantan secara simultan

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil eksplorasi tersebut diyakini akan membantu banyak pihak, termasuk:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan membantu menciptakan bagian akademik yang terkait dengan penelitian masa depan tentang Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti lain dan masyarakat luas dapat menggunakan temuan ini sebagai sumber penelitian mereka sendiri

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi pencipta, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan bantuan dalam menerapkan informasi yang diperoleh selama perkuliahan di Program Studi ilmu ekonomi pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- b. Bagi para skolastik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi tambahan mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia untuk eksplorasi tambahan yang memerlukan perbaikan informasi ekstra..
- c. Bagi Pemerintah Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari informasi dan sebagai kontribusi rencana bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'fifah, R. (2021). *Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107651>
- Abdillah, F., & Wahyudi, M. S. (2021). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan, Dana Perimbangan, Dan Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), 738–750. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.19450>
- Ainuri, N. U. P., & Febrina, H. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(3), 384–395. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i3.21672>
- Amartya sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Ari Kuncoro. (2021). *Mengatasi Ketimpangan Regional di Indonesia: Tantangan DAU*.
- Arsyad, L. (2014). *Ekonomi Pembangunan*.
- Auty, R. and Gelb, A. (2001). The Political Economy of Resource-Abundant States. *Resource Abundance and Economic Development*.
- Azwar, & Subekan, A. (2014). Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 1, 79–101.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (2014). *Fiscal Decentralization and the Challenge of Development*.
- Bastian, I. (2006). Privatization Framework: Political Economy Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 10(1). <https://journal.uin.ac.id/JAAI/article/view/798>
- Budi Winarno. (2002). Teori Dan Proses Kebijakan Publik. *Media Pressindo*, 204.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. <Http://Dx.Doi.Org/10.1177/031289629101600103>, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Dydha, D. O. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*.
- Fadilah, D. (2023). *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi Indonesia Timur Periode Tahun 2015-2022*.
- Firly Dwitya Kamilia. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Periode 2011 Hingga 2013 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 9(2), 10.

<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>

Gujarati, D. N. (2015). *Panel data regression models. Econometrics.*

Harsono, dkk. (2024). The Influence Of Education Expenditure, Health Expenditure And Social Assistance Expenditure On Human Development Index In NTB Province In 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiuku.com/index.php/msej>

Hess, P., & C. Ross. (1997). *Economic Development Theories, Evidence and Policies. New York: The Dryden Press.*

Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718>

Jeffrey L. Pressman, A. W. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland.*

Juliarini, Aniek, and A. W. H. (2020). Pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Tanah Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara.*

Kanbur & Venables. (2005). *Spatial Inequality and Development. Oxford University Press.*

Keuangan, K., Jenderal, D., & Keuangan, P. (n.d.). *Kebijakan DID 2021.*

Keynes, J. M. (2018). The general theory of employment, interest, and money. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, 1–404. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2/Cover>

Kurniasari, R. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.* 1–23. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (n.d.). *Analisis Pengaruh Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Ipm Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016 Analysis Of The Effect Of Dau, Dak, And Dbh To Hdi In Former Kedu Residency Districts / Cities 2012-2016.*

M. Afrizal Yusuf. (2019). 4945-9624-1-Sm. *Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018.*

Manggala, G. D. (2019). Pengaruh Dana Desa (DD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 1(November), 1–7.

- mardiasmo. (2018). *Penguatan Peran Desentralisasi Fiskal dalam Peningkatan Kesejahteraan*.
- Niskanen, W. A. (1971). *Bureaucracy and Representative Government*. Aldine Transaction.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 20(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3158>
- Oates, W. E. (2006). On the theory and practice of fiscal decentralization. *IFIR Working Paper*.
- Paul Romer. (1990). *Paul Romer and Modern Endogenous Growth Theory*. 251–281. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-83761-7\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-030-83761-7_9)
- Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 536–564.
- Prasetyo, Y., Kunci, K., Dana Desa, A., Sumber Daya, K., Pelaksana, S., & Birokrasi, S. (2015). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di 10 desa wilayah kecamatan rembang kabupaten rembang*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/3263/870>
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 863–877.
- Ramadhan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(01), 108–118. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i01.1020>
- Ramadhani, F. dan R. (2022). *Pengaruh Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan*. 5(1), 13–19. <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284>
- Riviando, A., Agustin, H., Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- Rohmahwati, N. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur (Pada 38 Kabupaten/Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7305>
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*.
- Santi, N. Y., & , Heppy Purbasari, SE, M. A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah*

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2017).

- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Saswatata, P. (2021). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.36407/JRMB.V6I2.572>
- Saswatata, S. S., & Parju, P. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Serat Acitya*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.56444/SA.V11I1.2953>
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D Cetakan 17*.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan Pad Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3), 285–305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>
- Susanti, E., & Hidayat, N. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Eco-Build Journal*, 4(2), 25–34.
- Syafira, R., Khoirudin, R., & A'yun, I. Q. (2024). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Perkapita, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2014-2022. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 96–105. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.486>
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan , Pendidikan , Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720–16729. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5550>
- Umiyati, E., Amril, A., & Zulfanetti, Z. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.22437/jssh.v1i1.3764>
- Widarjono, A. (2007). *Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan E-Views*.

- Widodo, A., & Johanna Maria, dan K. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42. <https://doi.org/10.14710/Jdep.1.1.25-42>
- Wulandari, R., Fadilah, Okataviyani, M. L., Jabbar, M. A., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Kesehatan Dan Indeks Pendidikan Terhadap Indeks Indeks Kesehatan. 241–247.